



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI X DPR RI**

**(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA,
PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, RISTEK DIKTI, DAN PERPUSNAS)**

Tahun Sidang	: 2016 - 2017.
Masa Persidangan ke-	: I (satu).
Sifat Rapat	: Terbuka.
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat.
Dengan	: 1. Deputi I Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Kemenpar RI. 2. Deputi II Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Mancanegara Kemenpar RI.
Hari/Tanggal	: Selasa, 27 September 2016.
Pukul	: 10.00 WIB s/d selesai.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI.
Pimpinan Rapat	: Drs. Abdul Fikri Faqih, M.M /Wakil Ketua Komisi X DPR RI.
Sekretaris Rapat	: Sarilan Putri Khairunnisa, S.Sos/Kabagset Komisi X DPR RI.
Acara	: Pendalaman RKA K/L TA 2017.
Hadir	: 31 orang dari 51 Anggota Komisi X DPR RI.
Hadir Pemerintah	: 1. Deputi I Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Kemenpar RI beserta jajarannya. 2. Deputi II Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Mancanegara Kemenpar RI beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN.

Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 11.00 WIB oleh Drs. Abdul Fikri Faqih, M.M/Wakil Ketua Komisi X DPR RI, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 251 ayat (1) dan pasal 246 ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Kemenpar RI, dan Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Mancanegara Kemenpar RI serta menampung pertanyaan, saran dari Anggota Komisi X DPR RI.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

A. DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DESTINASI DAN INDUSTRI PARIWISATA KEMENPAR RI

1. Pagu anggaran (sementara) Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Kemenpar RI RAPBN TA 2017 sebesar Rp 247,317 miliar mengalami penurunan Rp 141,678 miliar atau 36,42 persen terhadap pagu anggaran (sementara) RAPBN TA 2016 sebesar Rp 388,995 miliar.
2. Komisi X DPR RI menilai bahwa infrastruktur, daya dukung sarana prasarana, pengembangan industri dan investasi pariwisata dalam rangka pencapaian target mendatangkan wisman ke 10 destinasi wisata prioritas masih sangat minim. Untuk selanjutnya, Komisi X DPR RI mendesak Kemenpar RI untuk lebih meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antardeputi maupun dengan K/L terkait dalam menyusun program/kegiatan prioritas nasional.

B. DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA MANCANEGERA KEMENPAR RI

1. Pagu anggaran (sementara) Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Mancanegara Kemenpar RI RAPBN TA 2017 sebesar Rp 2,072 triliun mengalami penurunan sebesar Rp 1,453 triliun atau 41,22 persen terhadap pagu anggaran (sementara) RAPBN TA 2016 sebesar Rp 3,525 triliun.
2. Komisi X DPR RI menilai bahwa strategi pemasaran melalui **DOT**, strategi promosi melalui **BAS**, strategi media melalui **POSE**, dan strategi rentang waktu promosi melalui **POP** harus terus dikaji dan evaluasi ukuran keberhasilan secara berkala agar strategi yang ditetapkan tersebut sesuai dengan perencanaan, anggaran, dan target.
3. Komisi X DPR RI akan mengevaluasi usulan anggaran di Deputi Bidang Pengembangan Pariwisata Mancanegara sebesar Rp 2,072 triliun (didalamnya untuk publikasi pariwisata mancanegara sebesar Rp742 miliar pada RAPBN TA 2017) dari sisi struktur pembelanjaan dikaitkan dengan rencana target yang ditetapkan Pemerintah (PDB, devisa, jumlah tenaga kerja, indeks daya saing, dan jumlah kunjungan wisman).
4. Komisi X DPR RI meminta Kemenpar RI agar istilah "*core business*" pada program bidang pariwisata disesuaikan dengan nomenklatur kebijakan kepariwisataan Pemerintah.

C. Lain-lain

1. Komisi X DPR RI mendesak Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Mancanegara, dan Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Kemenpar RI untuk merasionalisasi usulan program/kegiatan dan anggarannya dengan memperhatikan kesinambungan/keberlanjutan program, tren kepariwisataan, penyiapan dan kesiapan SDM, serta target Pemerintah.

2. Hasil rasionalisasi tersebut akan digunakan sebagai bahan Raker Komisi X DPR RI dengan Menpar RI yang dijadwalkan pada tanggal 6 Oktober 2016.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul **14.00** WIB

KETUA RAPAT,



DRS. ABDUL FIKRI FAQIH, M.M